

	News Title : Heran Perbankan Dilarang Fasilitas Transaksi Kripto, Indef: Masa Offline?	
	Media Name : tempo.co	Journalist : Antara
	Publish Date : 09 February 2022	Tonality : Neutral
	News Page :	News Value : 2,250,000
	Resources : Nailul Huda (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)), Ibrahim Assuaibi (Direktur PT TRFX Garuda Berjangka), Teguh K Harmanda (Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo))	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : kripto

Heran Perbankan Dilarang Fasilitas Transaksi Kripto, Indef: Masa Offline?

Reporter: [Antara](#)

Editor: [Ali Akhmad Noor Hidayat](#)

Rabu, 9 Februari 2022 07:39 WIB

0 KOMENTAR



Berlangganan

Login

IS METRO DUNIA BOLA ~ CANTIK ~ TEKNO OTOMOTIF ~ FOTO VIDEO RU

LAINNYA ~ 🔍

penampung dana dari kegiatan melanggar hukum, termasuk kripto.

Padahal, kripto sendiri telah dirancang sebagai komoditas oleh [Bappebti](#) di bawah Kementerian Perdagangan. Tidak hanya itu, Bappebti juga telah merancang aturan terkait perdagangan dan pedagang kripto secara resmi. Artinya, selama transaksi dilakukan oleh pedagang kripto terdaftar dan diawasi Bappebti, skema perdagangan kripto layaknya komoditas ataupun produk derivatif lainnya.

Di lain sisi, Nailul memahami sudut pandang OJK yang masih mempersepsikan bahwa aset kripto berpotensi sebagai alat tukar layaknya uang fiat, karena namanya adalah cryptocurrency. Sedangkan alat tukar resmi adalah Rupiah sebagaimana diatur perundang-undangan.

"Tapi kan sejak awal ketika Bappebti memfasilitasinya, kesepakatannya di Indonesia hanya boleh digunakan sebagai aset investasi. Bukan alat transaksi," kata Nailul.

Oleh karena itu, ia menilai ada kejanggalan dengan imbauan dari otoritas agar perbankan tidak memfasilitasi transaksi aset kripto, padahal sejak awal Bappebti merumuskan kripto sebagai komoditas investasi. x

"Bagaimana bisa investor membeli atau berinvestasi aset kripto kalau tidak bisa menggunakan rekening bank sebagai jembatan untuk beli atau jual aset kripto ke pedagang kriptonya? Kan ini aset digital, masa iya beli dan jual-nya lewat pedagang langsung secara offline," ujar Nailul.

Lebih jauh, dia sepakat bahwa otoritas dan Satgas Waspada Investasi (SWI) berhak melarang sejauh perdagangan itu bersifat ilegal, termasuk dilakukan oleh pedagang kripto yang tidak terdaftar.

"Selama ini Bappebti sudah merilis mana saja pedagang kripto dan koin kripto yang terdaftar dan berizin resmi di Bappebti. Seharusnya itu sudah cukup jadi acuan untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan keterlibatan bank," kata Nailul.

Dia menambahkan bahwa OJK berhak dan berwenang mengatur dan melarang perbankan dalam ekosistem aset kripto, dalam hal penempatan dana bank ke dalam bentuk aset kripto. Sebab, lanjut Nailul, karena dana di bank adalah dana masyarakat.

Sementara itu, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengungkapkan adanya gesekan dengan OJK akan berdampak pada tela-tnya peluncuran bursa kripto. Sebab, fungsi lembaga keuangan, dalam hal ini bank nantinya akan sebagai kustodian untuk perdagangan aset kripto. Kustodian ini dinilai paling penting posisinya.

"Jadi saya tidak heran kenapa launching bursa kripto ini molor terus dari semester II 2021 lalu, rupanya ada deadlock, antara Bappebti dan OJK dalam melaksanakan perdagangan aset kripto yang diakui negara, dalam hal ini bursa kripto," ujar Ibrahim.

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh K. Harmanda mengatakan, pihak asosiasi menghargai pernyataan dari otoritas. Namun, menurutnya, sejauh ini asosiasi telah berupaya untuk menempatkan perdagangan kripto sesuai aturan main dan melengkapi perlindungan hukum.

"Bahwa sudah semestinya kita harus menjaga industri agar tumbuh secara sehat, contohnya pada industri aset kripto yang sudah menerapkan rekomendasi terhadap APU/PPT, adanya pelaporan yang diwajibkan oleh Bappebti setiap harinya, dan melaporkan jika menemukan transaksi mencurigakan," ujar Teguh.